

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN TOP DOWN DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PUSAT OLEH-OLEH SERDANG
BEDAGAI DESA PASAR BENGKEL**

SKRIPSI

OLEH :

**DEA EKA PUTRI NST
NPM : 1903100005**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : DEA EKA PUTRI NST
NPM : 1903100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr.SITI HAJAR,S.Sos.,M.SP

PENGUJI II : RAFIEQAH NALAR RIZKY,S.Sos.,MA

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL,S.Sos.,M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : DEA EKA PUTRI NST
NPM : 1903100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Serdang Bedagai di Desa Pasar Bengkel

Medan, 26 Mei 2023

PEMBIMBING



DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si
NIDN. 0110097201

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, DEA EKA PUTRI NST, NPM 1903100005, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Mei 2023

Yang Menyatakan,



DEA EKA PUTRI NST

Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel

**Dea Eka Putri Nst
NPM 1903100005**

ABSTRAK

Semakin berkembangnya suatu UMKM yang berpotensi untuk menciptakan persaingan pasar yang tinggi dalam perkembangan ekonomi. Di pasar Bengkel memiliki UMKM lokal berupa tempat wisata dan usaha kuliner yang khas yaitu dodol. Kemudian, terdapat 5 (lima) pendekatan pada penelitian ini, yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Salah perencanaan *Top Down* yang dilakukan dengan pembangunan jalan tol meski pembangunan ini memiliki dampak positif bagi masyarakat tetapi terdapat dampak negatifnya yang sangat merugikan bagi UMKM di Desa Bengkel yaitu omzet penjualannya mengalami penurunan akibat berkurangnya pembeli yang berdatangan ke desa tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan top down yang telah dilakukan dalam pengembangan UMKM pusat oleh-oleh Kabupaten Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi perencanaan *Top Down* yang telah dilakukan dalam pengembangan UMKM pusat oleh-oleh Kabupaten Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel dapat dikatakan sudah efektif tetapi hanya kurang efektif pada pendekatan sasaran saja.

Kata Kunci: UMKM, Top Down, Pasar Bengkel

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Serangkaian kata terimakasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya sayangi yaitu Bapak Syahrul Nst dan Ibunda Pristi yani yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah cukup banyak memberikan semangat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani,S.Sos.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra.Hj.Yusrina Tanjung,M.Ap selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah,S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dedi Amrizal,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Onggung PG Purba, S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.Serdang Bedagai yang telah bersedia memberi izin keluangan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Musaddig Daulay, S.Sos selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Ketenagakerjaan,Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai
11. Bapak/Ibu para pelaku UMKM selaku Narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.

12. Terimakasih kepada seseorang yang sangat amat spesial yang tidak bisa penulis sebutkan namanya maupun penulis deskripsikan bagaimana orangnya. Akan tetapi dia telah membantu, menemani dan bahkan selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai tepat pada waktunya sehingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.
13. Kepada Adik dan para sepupu yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
14. Kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai di titik ini. Kamu hebat dan aku bangga jadi aku.

Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari sepenuhnya sebagai penulis pemula tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2023

Penulis

DEA EKA PUTRI NST

1903100005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1. Efektivitas.....	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas	8
2.1.2 Pendekatan Efektivitas.....	9
2.1.3 Efektivitas Kerja	11
2.1.4 Efektivitas Perencanaan.....	12
2.2 Perencanaan.....	13
2.2.1 Pengertian Perencanaan	13
2.3 Perencanaan <i>Top Down</i>	15
2.3.1 Pengertian Perencanaan <i>Top Down</i>	15
2.3.2 Implementasi Perencanaan Pendekatan <i>Top Down</i>	16
2.3.3 Indikator Perencanaan <i>Top Down</i>	18
2.4 UMKM	20
2.5 Pengembangan.....	21
2.6 Efektivitas Perencanaan <i>Top Down</i>	22
BAB III METODE PENELITIAN	24

3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Kerangka konsep	24
3.3 Definisi Konsep	25
3.4 Kategorisasi Penelitian	26
3.5 Sumber data	26
3.6 Metode Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Lokasi dan Waktu penelitian	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	28
3.9.1 Dinas Koperasi dan UMKM	28
3.9.2 Tugas dan Fungsi Dinas dan Bidang	29
BAB IV PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Adanya Pendekatan Sasaran Perencanaan Top Down	32
4.1.2 Adanya Pendekatan Sumber Daya Perencanaan <i>Top Down</i>	33
4.1.3 Adanya Perencanaan Top Down yang Sistematis	34
4.1.4 Adanya Implementasi Perencanaan Top Down	34
BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian	45
LAMPIRAN 2 Hasil Wawancara	48
LAMPIRAN 3 Dokumentasi Penelitian	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	25
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai	30

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian	45
LAMPIRAN 2 Hasil Wawancara.....	48
LAMPIRAN 3 Dokumentasi Penelitian.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya UMKM akan menunjang perekonomian suatu daerah sehingga mampu produktif dan menggerakkan roda perekonomian. Munculnya UMKM mampu menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang besar ini akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu UMKM berpotensi dalam pengembangan produktivitas maupun daya saing serta berfungsi untuk menciptakan teknologi, produk dan jasa yang baru, pendukung pertumbuhan ekonomi menciptakan perubahan dan kompetensi pada pasar. Pertumbuhan ekonomi dinilai dengan melihat pertumbuhan pendapatan dari Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang ada di sekitar Desa Bengkel.

Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu daerah yang memiliki begitu banyak tempat wisata salah satunya wisata kuliner yaitu Desa Bengkel berbasis UMKM kuliner dodol yang letaknya di jalan lintas Sumatera, persisnya di Desa Bengkel atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Bengkel. Pasar Bengkel merupakan pusat oleh-oleh Serdang Bedagai juga terkenal dengan sebutan Pasar Dodol, karena setiap kios di Pasar Bengkel tersebut menjual dodol yang khas dari Serdang Bedagai. Selain menjual dodol, di sini juga menjual berbagai cemilan lainnya seperti aneka keripik, kerupuk, beberapa minuman khas, dan berbagai jajanan lainnya. Selain makanan dan minuman, di Pasar Bengkel tersebut menjual kerajinan tangan seperti sapu, nampan yang terbuat dari bambu, celengan yang terbuat dari tanah liat dan didesain sangat cantik menyerupai karakter kartun maupun hewan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan pentingnya efektivitas perencanaan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan wilayah tersebut.

Perencanaan dalam suatu wilayah dikenal beberapa konsep pendekatan. Dalam UU No 25 Tahun 2004 ini setidaknya terdapat 5 (lima) pendekatan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); dan (5) bawah-atas (*bottom-up*). Dimana dalam undang undang ini menyatakan bahwa dalam suatu proses perencanaan ada yang namanya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU No.25 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* dan *bottom-up*, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Menurut Susatyo Herlambang (2013) menyatakan bahwa perencanaan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Sururi (2016), perencanaan *top down* merupakan perencanaan dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat (Wibawa, 2017). Keterlibatan masyarakat dalam pendekatan *top-down* relatif minim. Menurut Suzetta (1997), *Top-Down Planning* merupakan suatu proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga,

departemen atau daerah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Dalam *Top-Down Planning* fungsi utama dalam kendali mutu dan perencanaan dipegang oleh pemberi tugas atau pemilik yang kemudian diturunkan kepada pelaksana. Pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai pemegang wewenang maupun pemberi tugas di dalam perencanaan tanpa memperdulikan situasi nyata pada bagian bawah (pelaksana). Dengan kata lain pendekatan ini lebih berfokus pada satu sumber utama dengan meminimalisir faktor lain yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Pendekatan ini didasarkan oleh dorongan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya sendiri. Bentuk perencanaan *Top Down* dapat diawali dengan tingkatan kewenangan paling Tinggi, yaitu dilakukan melalui Pemerintah daerah sampai kepada masyarakat sehingga muncul regulasi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian perencanaan dengan implementasinya. Menurut Wahyudi (2006), proses perencanaan yang aliran dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan adalah proses perencanaan *bottom up* dan *top down*.

Salah satu perencanaan *Top Down* yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan Medan, Tebing Tinggi, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu sepanjang 61,80 km dengan ujung utara adalah Tanjung Morawa dan ujung selatan adalah Tebing Tinggi ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera dan terbagi 2 seksi, yaitu Seksi I (Medan-Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 km dan Seksi II (Perbarakan Tebing Tinggi) sepanjang 44 km. Pembangunan sarana umum seperti infrastruktur jalan tol salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah serta dengan tujuan mengurangi kemacetan. Pembangunan infrastruktur adalah suatu upaya pemerintah menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pembangunan ini diharapkan masyarakat dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin. Pembangunan infrastruktur jalan tol tidak selalu memiliki nilai positif bagi masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik oleh sebagian

orang pasti memiliki nilai negatifnya atau berdampak negatif. Termasuk kehadiran jalan tol, berdampak negatif bagi UMKM di Desa Bengkel (Suardi, 2022). Hadirnya jalan bebas hambatan atau jalan tol yang terbentang dari Kota Medan menuju Kota Tebing Tinggi yang membelah Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai khususnya Desa Bengkel ternyata membawa sebuah permasalahan baru bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang ada disana. Pembangunan ini diharapkan masyarakat dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin. Pembangunan infrastruktur jalan tol tidak selalu memiliki nilai positif bagi masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik oleh sebagian orang pasti memiliki nilai negatifnya atau berdampak negatif. Termasuk kehadiran jalan tol, berdampak negatif bagi UMKM di Desa Bengkel.

Padahal Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) sudah terbukti sebagai penyangga ekonomi nasional disaat krisis ekonomi melanda Indonesia. Sejak ruas jalan tol Medan – Tebing Tinggi dibuka Oktober 2017, usaha yang digeluti oleh masyarakat Desa Bengkel mengalami kelesuan akibat jumlah pelanggan yang kian menurun. Penyebab yang mengemuka di masyarakat adalah karena menurunnya daya beli ditambah lagi akibat dari *pandemic covid 19* yang sedang mewabah saat ini. Namun yang paling banyak dirasakan disebabkan oleh kendaraan yang biasanya melintasi di Pasar Bengkel (Jalan Lintas Sumatera), banyak yang mengalihkan jalurnya menggunakan ruas jalan tol, dan tak lagi melewati pusat jajanan dan oleh-oleh khas Kabupaten Serdang Bedagai ini. Penurunan omset pun terjadi sejak dioperasikannya Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi. Kendaraan roda empat atau lebih, yang menjadi harapan dan biasa singgah di kios-kios sepanjang jalan Desa Bengkel, kini sudah berkurang drastis. Begitu juga saat lebaran atau hari libur nasional lainnya, peningkatan penjualan juga tidak meningkat seperti sebelumnya (Suardi 2022). Bagi masyarakat yang lahannya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, mereka akan mendapatkan ganti untung dan sering kali beralih profesi dari petani ke pedagang, dari petani ke buruh dan dapat pula tetap sebagai petani tetapi ditempat yang lain. Perubahan-perubahan ini juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar

yang tidak terkena ganti rugi, sehingga terjadinya perubahan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai.

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Menurut Peraturan Pemerintah mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Undang-Undang ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM, dengan ini pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi-informasi data yang berisi peran pelaku UMKM dan produktif.

Menurut pemaparan tersebut, pemerintah memiliki peran penting terhadap pengembangan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai di Desa Pasar Bengkel. Terkait pula efektivitas perencanaan *top down* yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai terhadap UMKM yang pengembangannya masih belum maksimal dan masih mengalami banyak permasalahan terutama dari para pelaku usaha itu sendiri. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait juga yang semakin menghambat proses perkembangan perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Efektivitas Perencanaan *Top Down* Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Apakah perencanaan *top down* berjalan efektif dalam upaya mengembangkan UMKM Pusat Oleh-oleh di Kabupaten Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah perencanaan *top down* berjalan efektif dalam mengembangkan UMKM pusat Oleh-oleh Kabupaten Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat dalam penelitian adalah

- a. Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku UMKM pusat Oleh-oleh Kabupaten Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel mengenai perencanaan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun mengenai perencanaan pengembangan UMKM bagi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Serdang Bedagai.
- c. Dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari oleh peneliti di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSAKA

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah efektivitas perencanaan *top down* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah pusat oleh-oleh khas Serdang Bedagai desa pasar bengkel

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian Efektivitas perencanaan *top down* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah pusat oleh-oleh khas Serdang Bedagai desa pasar bengkel

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Tika (2014), kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Adapun menurut pendapat Priansa (2013), konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Menurut Pekei (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Berdasarkan pemaparan Indrawijaya (2010), efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi berdasarkan tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis, tingkat kehidupan organisasi, dan minat mengevaluasi. Tangkilisan (2005) mendefinisikan efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Menurut Siagian (2001) mengatakan bahwa efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Otenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Sedangkan menurut Muhidin (2009), efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki secara efisien ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

2.1.2 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan efektif, Menurut Strawaji (2009) ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas, yaitu: a). pendekatan sasaran yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi merealisasikan sasaran yang ingin dicapai; b). pendekatan sumber yaitu untuk mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya; c). pendekatan proses yaitu sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Adapun menurut Dimianus (2014), Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu (a) pendekatan sasaran (*Goal Approach*), pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. 8 Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan

memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif; (b) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*), pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan; (c) pendekatan Proses (*Internal Process Approach*), pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Berdasarkan pemaparan dan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan kegiatan mengukur sejauh mana kegiatan efektif melalui pendekatan sasaran, pendekatan sumber daya, dan pendekatan proses. Efektivitas menjadi unsur pokok untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas dapat dikatakan efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.3 Efektivitas Kerja

Menurut Steers (1985) efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan.

Sedangkan Robbins (2003) menyatakan efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Ukuran penilaian yang digunakan adalah tepat tidaknya organisasi atau perusahaan dalam menjalankan segala sesuatu misalnya pelaksanaan program atau aktivitas. Efektivitas kerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Sedangkan Siagian (1994) memberikan pengertian bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Artinya penggunaan waktu yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Hasibuan (2003) efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam

mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja merupakan suatu ukuran dalam penyelesaian pencapaian kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan atau organisasi, serta kemampuan untuk melaksanakan aktifitas – aktifitas yang telah di tetapkan suatu lembaga untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal.

2.1.4 Efektivitas Perencanaan

Menurut Nurdin (2019) menyatakan bahwa efektivitas perencanaan adalah perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan sasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dapat diukur dengan standart yang berlaku. Sedangkan usaha untuk merencanakan kegiatan tidak terlepas dari beberapa faktor, dalam memperoleh perencanaan yang berguna dan hasil yang dicapai melakukan langkah-langkah yang teratur dan sitematis harus ditempuh dengan mengumpulkan sumber - sumber informasi dari bawahan sehingga pada akhirnya mencapai tujuan organisasi Nurdin (2019). Menurut Mulyasa (2006), efektivitas artinya kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Sedangkan perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resource*), sumber daya alam (*Natural Resources*), dan sumber daya lainnya (*other resources*) utnuk mencapai tujuan. Efektivitas perencanaan merupakan suatu aktivitas integrative yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Suwasono (2022), efektivitas perencanaan merupakan kepastian adanya keterampilan dan motivasi pekerja terhadap informasi, alat bantu, material, dan dukungan waktu maupun tempat yang benar untuk melaksanakan tugas. Adapun pendapat menurut Sumolang (2021),

efektivitas perencanaan merupakan pendekatan untuk mengukur kesesuaian rencana yang telah disusun (*planning*) terhadap tujuan organisasi tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan Brody dan Highfield (2005) dengan mengukur efektivitas perencanaan melalui pegujian antara isi dan hasil rencana. Indikator dari penelitian, diantaranya melalui; (a) peran akan tanggung jawab dalam implementasi, (b) mekanisme akan pendanaan, (c) pemantauan lingkungan atau ekologis dan (d) penerapan sanksi yang ketat. Oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa efektivitas perencanaan adalah suatu aktivitas untuk mengukur dan memastikan penggunaan sumber daya yang dimiliki seperti keterampilan, motivasi pekerja, dan waktu terhadap target dan tujuan organisasi tersebut.

2.2 Perencanaan

2.2.1 Pengertian Perencanaan

Di dalam teori perencanaan ada tiga hal utama yang perlu dipahami, (a) definisi perencanaan; (b) *substantive* perencanaan, yaitu apa yang akan direncanakan dan untuk siapa merencanakannya dan (c) *normative* perencanaan, yaitu bagaimana dan apa alasan perencanaan yang akan disusun. Menurut pendapat Berry (1973) mengidentifikasikan empat model dalam perencanaan perkotaan yang prinsip-prinsipnya dapat pula diterapkan dalam perencanaan secara umum, yaitu : (a) *ameliorative problem-solving*, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada, dan cenderung hanya berorientasi pada jangka pendek; (b) *allocative trend-modifying* yaitu perencanaan yang lebih berorientasi ke masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa yang akan datang; (c) *exploitive opportunity-seeking* yaitu perencanaan yang sama sekali tidak mengidentifikasikan permasalahan di masa mendatang melainkan langsung melihat peluang-peluang baru muncul. Dalam model ini baik masyarakat maupun swasta menjadi pelaku utama dalam sektor-sektor ekonomi, selain pendekatan ini cenderung bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan

dengan sedikit sekali memperhatikan masa depan; (d) *normative goal oriented planning* yaitu perencanaan yang berorientasi ke masa depan dan mengidentifikasi tujuan-tujuan jangka panjang dan negara. Model ini kemungkinan digunakan pada Negara-negara yang berbentuk sentralisasi.

Berdasarkan konsep diatas perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda. Dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain menurut Prof.Dr. Ali Kabul Mahi (2017), perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Adapun pendapat menurut Hadiwiyono (2019) perencanaan menurut Abe adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang saksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Bintoro Tjokroamidjojo mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Menurut Fainstein (2005) teori perencanaan atau *planning theory* lebih banyak membahas tentang dimensi procedural perencanaan dan teori urban *theory in planning* membahas dimensi *substantive* dari perencanaan. Menurut Riyadi dan Brakusuma (2003) perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas. Menurut Hadari Nawawi (2001), perencanaan

merupakan suatu proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang berhubungan dengan menggunakan strategi dan metode untuk mencapai tujuan dan dapat diukur keberhasilan suatu kegiatan. Keberhasilan atau rencana dalam pendidikan tidak terlepas dari ada tidak orang yang ahli (sumber daya manusia) yang baik yang mampu mengambil keputusan tentang kuantitas dan kualitas SDM. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu rencana pemikiran-pemikiran ke depan secara matang yang mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian, tujuan tersebut dilakukan satu himpunan pengambilan keputusan.

2.3 Perencanaan *Top Down*

2.3.1 Pengertian Perencanaan *Top Down*

Menurut Mizan (2020), perencanaan *top-down*, adalah perencanaan yang dilakukan perencana profesional, atau oleh lembaga atau organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Adapun menurut Sururi (2016), perencanaan dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Jadi kita dapat simpulkan bahwa *Top down* adalah perencanaan yang langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat).

Pendekatan *top down* dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari *actor* tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan keputusan politik (kebijakan) yang telah

ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street – level – bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Salah satu scholar yang menganut aliran *top down* ini adalah Merilee S. Grindle pada tahun 1988.

Menurut Mizan (2020), perencanaan *top down* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (a) pengumpulan dan pengolahan data, Problem seeking, Perumusan visi dan misi, (b) analisis, Pengkajian lingkungan eksternal, (c) perumusan tujuan dan sasaran perencanaan, Pengkajian lingkungan internal, (d) pengembangan alternatif perencanaan, Perumusan isu-isu strategis, (e) Evaluasi dan seleksi alternatif rencana, Penyusunan strategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran), (f) penyusunan dokumen rencana, penyusunan rencana-rencana kerja (aksi/tindakan), dan (g) monitoring dan Evaluasi Tindakan/Kegiatan. Berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa perencanaan *top down* merupakan perencanaan langsung dari atas (pemerintah) yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga fungsional ke bawah (masyarakat) sesuai prosedur dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

2.3.2 Implementasi Perencanaan Pendekatan *Top Down*

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau: “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Model

rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Berdasarkan penelitian Mulyono (2006), Ada enam *variable* yang menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah: (a) ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil, (b) sumber daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan, (c) karakteristik agen pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya, (d) sikap/ kecenderungan (*disposition*), para pelaksana Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan, (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya, (f) lingkungan ekonomi, sosial dan politi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eskternal. Berdasarkan pemaparan tersebut kita dapat simpulkan bahwa implementasi perencanaan pendekatan *top down* merupakan pemodelan rasional dengan gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apaapa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem

2.3.3 Indikator Perencanaan *Top Down*

Dalam upaya pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan dan problematika, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaranjumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Menurut UU No. 66 Tahun 2007 tentang

perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa dalam membuat suatu konsep perencanaan pembangunan berdasarkan indikator sebagai berikut: (a) pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material, (c) berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa, (d) terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, pembangunan fisik Desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkannya yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, (e) akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah Desa maupun pada masyarakat, (f) selektif, semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal, (g) efisiensi dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya, (h) keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan, (i) cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi

penyimpangan, (j) proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik, (k) penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, indikator perencanaan *top down* adalah pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan, cermat, proses berulang, dan penggalian informasi.

2.4 UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: “UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Anoraga, dan Sudantoko (2002) mengartikan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah mengacu pada dua konsep yaitu aspek perusahaan dan aspek pengusaha. Aspek perusahaan akan melakukan aktifitas usaha yang produktif, mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan mencetak keuntungan. Sedangkan aspek pengusaha yaitu orang

dibalik usaha/ perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola sekaligus administrator dalam perusahaannya. Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut kita dapat simpulkan bahwa UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan mencetak keuntungan sesuai dengan kriteria.

2.5 Pengembangan

Menurut Thoha (2017), pengembangan adalah tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Ada dua unsur dalam definisi pembangunan. Artinya, (1) pengembangan itu sendiri kemungkinan berupa tugas, proses, atau pernyataan tujuan, dan (2) pengembangan dapat menunjukkan perbaikan dalam sesuatu. Menurut Sutarto (2018), pengembangan adalah strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan dapat mengubah keyakinan, sikap, nilai, dan struktur organisasi, dalam menanggapi perubahan dan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan baik terhadap teknologi, pasar, dan tantangan baru. Menurut uraian di atas, pengembangan UMKM berarti langkah langkah atau proses yang mengembangkan kondisi UMKM menjadi lebih baik dan memungkinkan pelaku usaha untuk lebih beradaptasi dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru.

Pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Menurut (ADB, 1999), pihak UMKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UMKM, peran dari sektor Perbankan dan provinsi, dll), dan nasional mendorong peningkatan pembangunan modal sosial dan tata pemerintahan yang sehat.

Sektor swasta juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan

perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UMKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pengembangan UMKM merupakan langkah langkah atau proses yang mengembangkan kondisi UMKM menjadi lebih baik dan memungkinkan pelaku usaha untuk lebih beradaptasi dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru., nilai, dan struktur organisasi.

2.6 Efektivitas Perencanaan *Top Down*

Menurut Awieta (2016), efektivitas perencanaan *top down* merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap perencanaan pemerintah dengan menilai indikator tujuan perencanaan tersebut di lapangan. Dalam pelaksanaannya pendekatan *top down planning* sering dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program. Jenis perencanaan ini dititikberatkan pada proses bagaimana perencanaan itu disusun secara organisasional dengan melihat mekanisme hubungan struktural dan fungsional di dalamnya.

Dapat diketahui bahwa pemerintah sudah merespon dengan baik kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, pemerintah mencoba untuk memberikan daya atau memampukan rakyatnya. Dalam pelaksanaannya pendekatan *top down planning* sering dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program. Secara konseptual, pendekatan *top down planning* memiliki arti suatu perencanaan yang dibuat oleh

pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Menurut Awieta (2017), dalam jangka yang lebih panjang hal tersebut justru memicu timbulnya polemik, seperti: (1) sifat ketergantungan dan kecemburuan sosial (2) pendataan RTSM, (3) kurangnya sosialisasi, (4) dan pencairan dana yang sering tidak tepat waktu merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Maka dalam implementasi perencanaan *top down* perlu melakukan persiapan yang matang agar efektivitas perencanaan *top down* dapat terwujud. Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas perencanaan *top down* merupakan penilaian efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap suatu rencana yang dilakukan melalui pendekatan dari atas(pemerintah) ke bawah (masyarakat)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

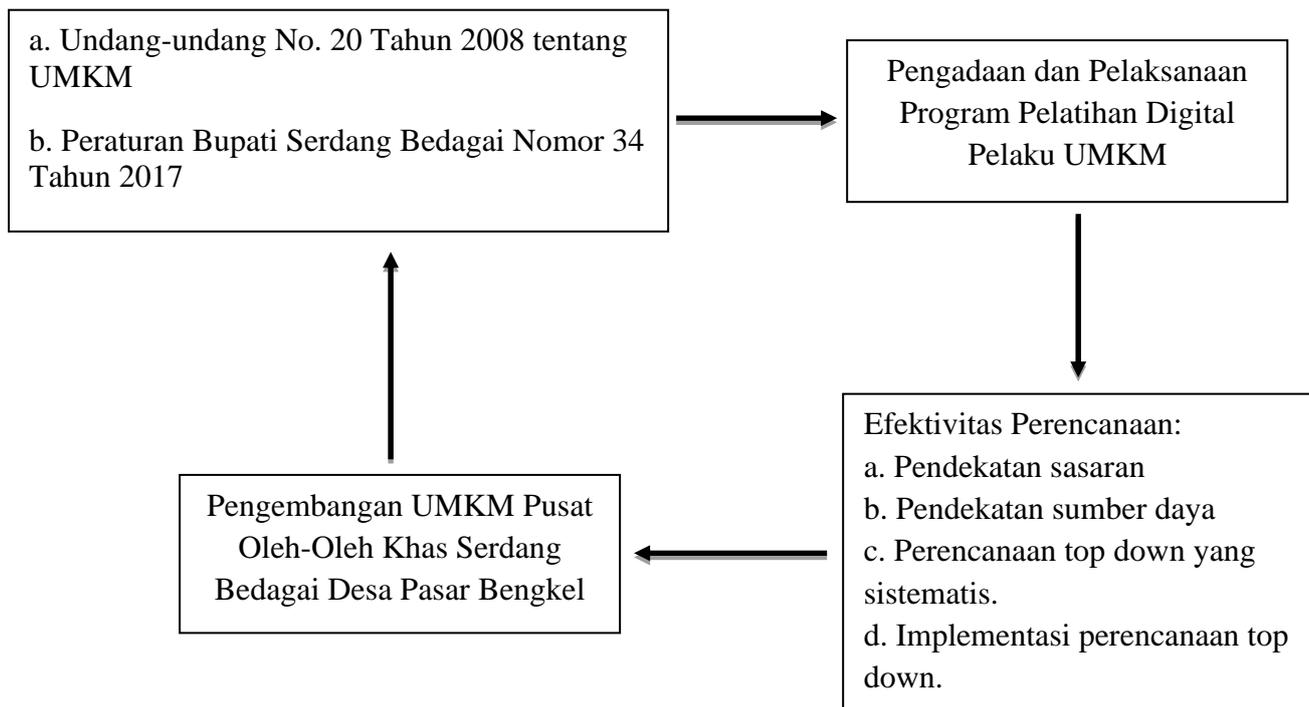
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Menurut pendapat (Creswell, 2016) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

3.2 Kerangka konsep

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel.

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



Sumber: hasil olah data peneliti

3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep- konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki secara efisien ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).
2. Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran dalam penyelesaian pencapaian kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan atau organisasi, serta kemampuan untuk melaksanakan aktifitas – aktifitas yang telah ditetapkan suatu lembaga untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal.

3. Perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu rencana merupakan pemikiran-pemikiran ke depan secara matang yang mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian, tujuan tersebut dilakukan satu himpunan pengambilan keputusan.
4. Perencanaan *top down* adalah perencanaan dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
5. Pengembangan adalah strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan dapat mengubah keyakinan, sikap, nilai, dan struktur organisasi, dalam menanggapi perubahan dan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan baik terhadap teknologi, pasar, dan tantangan baru.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Mustaqim (2017) Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down.
- b. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down.
- c. Adanya perencanaan top down yang sistematis.
- d. Adanya implementasi perencanaan top down.

3.5 Sumber data

Menurut Suharsimi (2010), sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan dokumen dan arsip.

1. Narasumber, dalam penelitian kualitatif narasumber (informan) sangat penting, bagi peneliti dalam memberikan informasi. Narasumber (informan) dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas ketenagakerjaan,

Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah dan Kepala bidang Koperasi.

2. *Key Informan*, menurut Moelong (2014), key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi masukan tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. *Key informan* dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang sudah berjalan 10 tahun.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang akan ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan suatu alat tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya. Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Serdang Bedagai dan pelaku usaha kecil dan menengah yang telah memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Serdang Bedagai.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk pengolahan data yang telag diperoleh dalam penelitian dan untuk menguji hipotesis dalam penelitian digunakan metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sebagai mana yang dikemukakan miles dan hubbermena yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adakah oenarikan kesimpulan Sugiyono (2013). Analisis data

dilakukan sesuai dengan tahapan kerangka konsep penelitian ini agar dapat menarik kesimpulan mengenai efektivitas perencanaan *top down* sebagai berikut: (a) Upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralayanan seperti mempersiapkan alat dan draft wawancara, menghubungi narasumber wawancara, dan menentukan tempat, (b) menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, (c) menyajikan temuan lapangan, (d) mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

3.8 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Februari 2023 sampai April 2023. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Serdang Bedagai dan pada usaha kecil dan menengah yang telah memperoleh pembinaan dan pengembangan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai melakukan tugas pembantuan di Bidang UKM yaitu upaya pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pengembangan yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Serdang Bedagai.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu dari 20 dinas yang berada di pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai berada di Jl. Negara KM.57 Sei Rampah, Kode Pos 20995. Dinas ini pada awal pembentukan bernama Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kabupaten Serdang Bedagai, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 03 tahun 2005

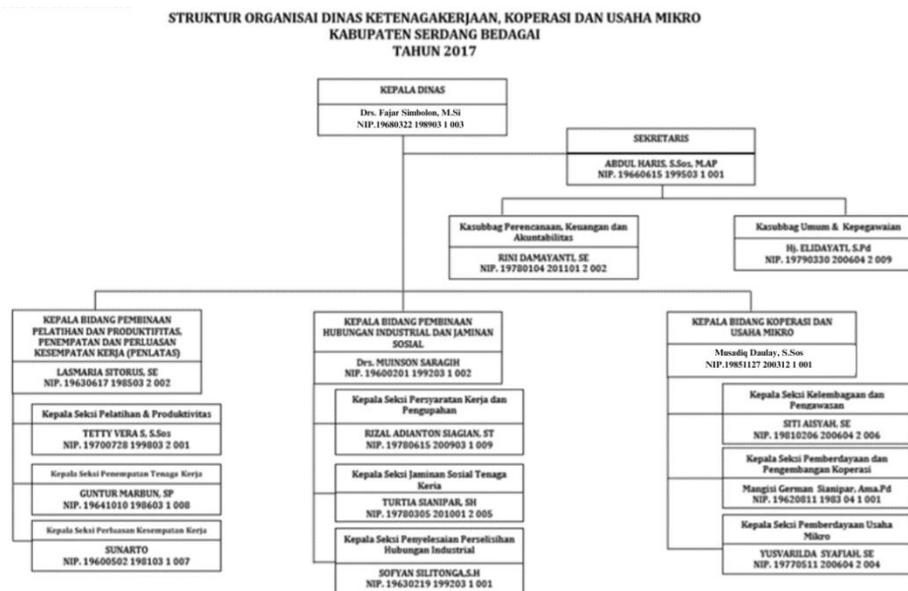
tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten No. 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai, instansi ini berubah nama menjadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang Bedagai. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Instansi ini Berubah nama menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berubah menjadi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun berikut struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai:

3.9.2 Tugas dan Fungsi Dinas dan Bidang

Tugas dinas dan bidang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, koperasi, dan dana usaha mikro.

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktifitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan *supervise* atas pelaksanaan urusan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktifitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai

Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Memberikan arah pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan UM Kabupaten Serdang Bedagai
2. Menyediakan rencana kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tiap tahun Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Visi

“Disnakerkop dan UM Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan Kesejahteraan Buruh serta Perusahaan.”

Misi

1. Memperkuat Peranan Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah
2. Meningkatkan daya saing tenagakerja

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai memiliki banyak program kerja yang telah terlaksana sebagai berikut:

1. Saluran bantuan alat produksi kuliner *handycraft*
2. Masuknya kabupaten Serdang Bedagai dalam kawasan prioritas perluasan kerja
3. Dalam rangka mewujudkan UMKM berdaya saing, dekranasda sergai memfasilitasi kerjasama dengan alfamart
4. Dalam rangka meningkatkan produktivitas Pelaku Usaha, Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi IPEMI Sergai mengadakan pelatihan
5. Pemberian bantuan stimulus ekonomi terhadap pelaku UMKM
6. Pemberian bantuan bagi pelaku UMKM pada masa pandemic covid
7. Pelatihan Digital bagi pelaku UMKM

Berdasarkan pemaparan tersebut, dasar penelitian ini adalah misi no. 1 mengenai pendekatan industri 4.0 dan program kerja pelatihan digital bagi pelaku UMKM di Bedagai Kota Serdang.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam dengan beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya: penelitian diawali dengan menjawab permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya melakukan wawancara dengan lima orang informan penelitian yang terdiri dari pengusaha perdagangan UMKM, yakni Dodol Anugrah, Dodol Zidan, Dodol Berkah, Dodol Silvi, dan Dodol Podo Seneng.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan pengusaha perdagangan UMKM. Adapun daftar pertanyaan yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.1 Adanya Pendekatan Sasaran Perencanaan Top Down

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku Admin Dodol Zidan mengatakan bahwa belum ada pelatihan digital yang dilakukan serta belum ada pemberitahuan, sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Ayu Zahara selaku Pemilik Dodol Berkah, Ibu Silvia Varina selaku Pemilik Dodol Silvi, Ibu Mis selaku

Admin Dodol Podo Seneng, dan Ibu Namira Aryani selaku Pemilik Dodol Anugrah. Tetapi, dari sisi Dinas Pemerintahan Pak Musadiz Daulay, S. Sos akan ada binaan pada setiap UMKM. Lalu akan diadakannya pelatihan yang bermanfaat dan bisa dilakukan oleh para pengusaha, seperti pengajaran terhadap penggunaan marketplace. Jika nanti diadakan pelatihan seharusnya penjualan dodol akan semakin berkembang. Sebab, banyak antusiasme dari para pengusaha UMKM yang ingin terlibat dalam pelatihan.

Sebab, selama ini mereka hanya memakai cara konservatif dengan menunggu di tempat sampai para pembeli datang. Mereka meyakini bahwa para pembeli sudah tahu tempat jualannya berada dimana. Selain itu, pemasarannya menjadi lebih luas dan tersebar merata. Suatu keberhasilan pelatihan diukur dari seberapa banyak masyarakat yang mengenal dodol dari suatu UMKM. Jika perencanaan pemerintah tidak sesuai maka yang harus dilakukan oleh pengusaha UMKM dengan memperbanyak posting jualan di online (marketplace).

4.1.2 Adanya Pendekatan Sumber Daya Perencanaan *Top Down*

Berdasarkan hasil wawancara perencanaan pengembangan UMKM dengan mengoptimalkan program – program pemerintah yang ada seperti program bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha, serta program pengembangan sumber daya manusia. Dapat juga dengan melakukan ekspor impor dari suatu tempat ke tempat lain. Selain itu, pemerintah juga dapat memperhatikan aspek infrastruktur dan regulasi yang dapat mendukung pengembangan UMKM seperti penyediaan akses penjualan dan teknologi seperti marketplace. Pemerintah memperhatikan sumber dayanya dengan cara mendorong UMKM untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah seperti fasilitas program yang telah disediakan. Kemudian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM melalui pelatihan dan Pendidikan.

Setelah itu, meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi informasi dan komunikasi agar lebih *efisien* dan *efektif* dalam bisnis. Lalu meningkatkan akses para UMKM terhadap pasar global melalui kerja sama dengan pihak luar negeri.

Pada pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya bertanggungjawab pada semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja. Pemerintah melakukan evaluasi dengan melihat penjualan dodol dan omzet meningkat. Kemudian, label Halal dan *MUI* bisa diperhatikan

4.1.3 Adanya Perencanaan Top Down yang Sistematis

Tolak ukur untuk perencanaan pengembangan UMKM Serdang dengan berapa banyak yang mengenal UMKM dodol. Perencanaan pengembangan UMKM yang teratur dan sistematis yang sangat penting untuk mencapai sasarannya. Perencanaan ini meliputi penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas – luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka. Terutama sumber daya lokal dan pengembangan kewirausahaan serta keunggulan kompetitif UMKM.

Rangkaian perencanaannya dapat dengan mengintegrasikan pengembangan UMKM agar lebih efektif dan efisien. Fokus terhadap sektor yang memiliki potensi untuk berkembang serta para pelaku UMKM dapat ditingkatkan kualitas SDMnya agar dapat bersaing di pasar global. Pertanggungjawaban pemerintah pun harus dilakukan secara sistematis dan terukur agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM di Indonesia.

4.1.4 Adanya Implementasi Perencanaan Top Down

Bentuk implementasi pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan membangun suatu tim yang memiliki kepribadian yang unggul (*soft skill*) dan kecerdasan (*hard skill*) untuk memudahkan implementasi strategi pengembangan UMKM. Kemudian menggunakan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang ada. Selanjutnya, menyesuaikan strategi pengembangan UMKM dengan kondisi

yang ada, yaitu pada saat *pandemi Covid-19* dan pembangunan jalan tol. Dinas Perekonomian dan Pariwisata yang merupakan SKPD bertanggung jawab atas pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, perencanaan ini dapat dilakukan oleh pihak lain seperti konsultan bisnis atau lembaga keuangan

Pemerintah yang melakukan evaluasi implementasi perencanaan dan pengembangan UMKM dengan beberapa cara, melalui penilaian kerja, monitoring, dan evaluasi. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pengembangan UMKM dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pengembangan UMKM dapat berjalan dengan baik dan efektif.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan UMKM

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat. Tujuan pemberdayaan UMKM dengan menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Peningkatan daya saing UMKM serta penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan teori tersebut belum sepenuhnya terlaksana maksimal dikarenakan adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami atau belum mengetahui tentang hal tersebut. Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlunya tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian bahwa banyak yang belum diberitahu adanya pelatihan dari pemerintah. Meski, pada konsep efektivitas sudah ada perencanaan yang ingin dituju dalam pelaksanaan kegiatannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hadi et al. (2015), menurut lampiran perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, bahwa tujuan pemberdayaan UMKM selaras sebab dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran serta pemberdayaan UMKM dalam pemabangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan belum sejalan dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan pemberitaan tentang pelatihan. Maka pendekatan tujuan dan sasaran dapat disimpulkan belum efektif.

4.2.2 Adanya pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UMKM

Bahwa para pelaksana yakni pemerintah sudah bertanggung jawab dan mengoptimalkan pada pengembangan UMKM. Programnya itu pendampingan usaha, pengembangan sumber daya, dan pelatihan. Pemerintah pun bertanggung jawab lewat mendorong UMKM dalam pemanfaatan fasilitas program yang disediakan. Lalu pemerintah melakukan evaluasi untuk melihat pengopimalan penjualan dodol dan kenaikan omzet yang dihasilkan.

Sehingga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, E. H. (2017), pengembangan UMKM di Indonesia dapat merujuk pada tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh suatu instansi. Tanggung jawab sebagai pemilik dapat meliputi konsumen pembeli produk hasil usaha dan juga terhadap rekan kerja. Kemudian, tanggung jawab itu antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaannya itu terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif, meminta bantuan pemodalan pemerintah, perlindungan usaha

sesuai jenis – jenis usaha tertentu, pengembangan kemitraan, pelatihan pemerintah, dan membentuk lembaga khusus.

Dapat juga mengikuti pembinaan yang tercantum pada undang – undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang pengkorporasian dalam pasal 60, pasal 61 dan pasal 62. Dilakukan dengan menciptakan dan memngembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Sedang Bedagai, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada UMKM. Setelah itu, yang lebih penting lagi berpusat pada pengawasan. Menurut Scherborn dalam Ernie dan Saefulla (2005), pengawasan ditetapkan pada kinerja yang dicapai. Sedangkan Harahap (2001) bahwa pengawasan itu untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan. Sehingga, tujuan dari pengawasan ini merujuk kepada pencegahan dan meningkatkan suatu operasi UMKM dan tidak terjadi pengulangan kesalahan.

Hal ini pun selaras dengan pelaksana UMKM untuk bertanggung jawab atas bisnis dan memiliki tanggung jawab yang besar dan kebutuhan yang besar untuk mengembangkan usahanya. Selain itu pengembangan sektor usaha UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah tetapi dibutuhkan peran swasta juga agar para pelaku UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga dapat bertumbuh di dalam kondisi ini. Sebab, menurut Mustari, 2014 bahwa bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan. Kemudian, untuk perencanaan kerja sudah sesuai sasaran dan target. Sebab sudah diorientasikan ke depan dengan didapati banyak manfaat serta peluang-peluang yang banyak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan karena pemerintah sudah ada perencanaan membuat

pelatihan pada UMKM. Maka pendekatan tujuan dan sasaran dapat disimpulkan efektif.

4.2.3 Adanya program yang dilaksanakan dalam melakukan perizinan UMKM

Dari perencanaan *Top Down* yang sistematis dapat dikatakan perizinan ini sudah terjamin dari efisiensi ekonomi dan pengembangan pada pendukung usaha. Sebab perencanaan ini sudah terbuka luas untuk menjamin kepastian usaha dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rozikan, R., 2021), melakukan perizinan dapat menggunakan PIRT untuk meningkatkan kualitas produk dan efektif dalam peningkatan penjualan. Caranya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembuatan perizinan ini. Lalu dapat membangun suatu komitmen dengan anggota lain mengenai perencanaan bisnis, produksi, distribusi serta pemasaran. Setelah itu dapat melakukan koordinasi dengan orang yang berkepentingan dalam perizinan.

Menurut Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah menghapus seluruh biaya perizinan UMKM dan semua biaya akan ditanggung APBN atau APBD. Pelaksana UMKM cukup mengurus Surat Izin gangguan (*HO*) serta izin mendirikan bangunan (*IMB*). Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (*UMKM*) dapat membuat Izin Usaha Mikro Kecil (*IUMK*) secara online melalui *Online Single Submission* (*OSS*). Kepemilikan *IUMK* memberikan beragam manfaat bagi pelaku UMKM seperti pelaku usaha lebih mudah menjalin kerja sama. Program perizinan UMKM dapat dilakukan secara *OSS* karena dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2022), dalam sistem *OSS* memiliki pelayanan perizinan yang berlaku dalam kemeterian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (*PTSP*). Sebab, sistem ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan begitu sudah sesuai dengan pendekatan yang direalisasikan pada sasaran, sumber daya yang dimiliki, dan proses yang dijalankan. Selain itu, adanya sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan karena pemerintah akan mengadakan juga sosialisasi dengan UMKM. Jadi kalau ada yang kebingungan bisa dikonsultasikan. Maka pendekatan tujuan dan sasaran dapat disimpulkan efektif.

4.2.4 Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan UMKM

Dari implementasi *top down* adanya pengaruh dari implementasi karena adanya tindakan nyata. Tindakan itu sudah terencana dari strategi pada pengembangan UMKM karena pandemic serta pembangunan jalan tol. Sehingga pemerintah melakukan pertanggung jawaban dalam pengembangan UMKM. Esekusinya juga dari *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program dilakukan.

UU Cipta Kerja diyakini akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (*UMKM*), karena menciptakan kemudahan dalam perizinan. UU Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem UMKM dan *e-commerce* melalui berbagai macam kemudahan. Bagi pelaku UMKM, nama merek dan perizinan memiliki pengaruh besar guna meyakinkan para konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi perizinan dan branding produk untuk UMKM.

Hal ini dibuktikan dari mengurus surat perizinan UMKM serta yang bersertifikat seperti, Halal dan MUI sulit. Selain itu, memerlukan waktu yang tidak sedikit serta biaya yang cukup banyak. Sehingga dari data yang didapat

bahwa UMKM akan dibantu oleh pemerintah akan terbantu dari segala sisi. Menurut Harmaizar (2008), dalam buku yang berjudul Menangkap peluang Usaha usaha merupakan suatu perusahaan dari bentuk bisnis yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi individu dan badan hukum dalam bentuk badan hukum yang diciptakan.

Berdasarkan teori – teori yang ada di atas bahwa pendaftaran perizinan usaha dengan pelaksanaan usaha memiliki pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 tahun 2017 yang menjadi pedoman para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan tugasnya membantu masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran izin usaha. Selain itu, efektif perencanaan juga sudah terlaksana karena targetnya sudah ditentukan. Berorientasi juga ke depan dan dapat melihat peluang dan mengembangkan strategi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan karena sudah terlaksana target yang ingin ditentukan. Selain itu, sudah melihat peluang ke depan. Maka pendekatan tujuan dan sasaran dapat disimpulkan efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perencanaan Top Down dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel sudah terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat terlihat dari uraian berikut:

1. Pendekatan sasaran perencanaan *top down* tidak efektif karena pelaku UMKM masih melakukan penjualan secara tradisional dan belum mencoba pemasan secara *online*, sebab dari sisi pemerintah belum melakukan pelatihan.
2. Pendekatan sumber daya perencanaan *top down* sudah optimal sebab pemerintah sudah banyak membantu dari sisi infrastruktur maupun bekerja sama dengan pihak luar negeri sehingga pemasaran dodol lebih luas.
3. Perencanaan *top down* yang sistematis sudah efektif karena pemerintah sudah mendorong SDM dari pelaku bisnis UMKM agar dapat bersaing secara local maupun luar negeri.
4. Implementasi perencanaan *top down* sudah efektif sebab pemerintah sudah melakukan evaluasi implementasi perencanaan dan pengembangan UMKM.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai dan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah agar pemerintah dapat meningkatkan informasi pelayanan dengan memberikan pemberitaan pelatihan dapat tersebar merata melalui media massa agar para pelaku UMKM dapat mengetahui agar pendekatan sasaran dari perencanaan lebih efektif

.DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W. M., & SE, M. (2022). PENTINGNYA MANAJEMEN PEMASARAN. *Manajemen Pemasaran (Konsep Pemasaran Digital)*, 43.
- Ambarini, N. S. B. (2017). Implementasi undang-undang no. 20 tahun 2008 dalam pengembangan usaha perikanan berkelanjutan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2), 32-50.
- Andrianti, F., & Oktafia, R. (2021). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI MEDIA ONLINE DESA KARANGPOH KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO (TINJAUAN PEMASARAN ISLAM). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1). <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp43-54>
- Angryani,Lysa, dkk. (2018). EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEJAHATANYA DI INDONESIA (F. Fabri (ed.)). *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Awieta (2016). Efektivitas Pendekatan Top-Down Planning Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Mengurangi Taraf Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Magelang). *Universitas Tidar. Magelang*.
- Brody, Samuel D., and Wesley E. Highfield. 2005. "Does Planning Work?: Testing the Implementation of Local Environmental Planning in Florida." *Journal of the American Planning Association* 71 (2): 159–75. <https://doi.org/10.1080/01944360508976690>.
- Ding, Dimianus. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 02, No. 02
- Hadi, Dwi Prasetyo. "Strategi pemberdayaan masyarakat pada usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal dalam rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 5.1 (2015).
- Hadiwijoyo Suryo Sakti. (2019). SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH (Yayat Sri Hayati (ed.)). PT RAJAGRAFINDO PERKASA.
- Halim, A. (2014). ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. AI-

- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1368>
- Harmaizar, Z. (2008). Menangkap peluang usaha. Diskon 40% -50%.
- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Penataan Hukum Nasional. *Jurnal Meraja*, 1(3).
- Hikmat, H. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humoniora
- Joharis.Lubis.Dr.H.M, dkk. (2019). ADMINISTRASI DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (suwito (ed.)). PRENADAMEDIA GROUP.
- Karsidi, Ravik. 2001.Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda
- Kusumastuti. (2017). No Title. EFEKTIVITAS PENDEKATAN TOP-DOWN PLANNING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN(Pkh) SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TARAF KEMISKINAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA TRASAN, KECAMATAN BANDONGAN MAGELANG), 1. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/66>
- Malelak, D., Kellen, P. B., & Rozari, P. De. (2020). EFEKTIVITAS KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal EBI*, 2(1). <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i1.12>
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan). Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Prof.Dr.Ir.Ali Kabul Mahi,M.S, dkk. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah (Riefmanto (ed.)). PT Kharisma Putra Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Perencanaan_Pembangunan_Daerah_Teori_dan/NOC2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+sistem+perencanaan&printsec=frontcover
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431-5445.
- Rosita, I., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(3), 259-265.

- Rozikan, R. (2021). Pendampingan Peningkatan Kualitas Produk Umkm Peyek Melalui Izin Pirt. In Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat.
- Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Putri, J. A. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 6(2).
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cet-23. Bandung, Alfabeta
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387>

LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Berprestasi dalam setiap langkahnya
Memori dan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/01/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsumed.ac.id> fkip@umsumed.ac.id [f umsumedan](#) [fb umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [wa umsumedan](#)

Nomor : 645/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 23 Ramadhan 1444 H
14 April 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Mikro**
Kabupaten Serdang Bedagai

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **DEA EKA PUTRI NST**
N P M : 1903100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERENCANAAN TOP DOWN DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PUSAT OLEH-OLEH SERDANG BEDAGAI DI DESA PASAR
BENGKEL**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Delan,

Dr. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan Negara No. 300 Telp./Fax. 0621 - 442183
 SEI RAMPAH

20695

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor: 1051/070/350/2023

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 645/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2023 Tanggal 16 April 2023 Hal : Permohonan melakukan penelitian

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : Dea Eka Putri Nasution
 NIM : 1903100005
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Efektivitas Perencanaan Top Down dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Serdang Bedagai di Desa Pasar Bengkel

- Untuk :
- Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi.
 - Kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat di Kabupaten Serdang Bedagai kiranya dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan data informasi yang terkait dengan pengambilan/pengumpulan data dimaksud kepada mahasiswa bersangkutan sepanjang untuk kepentingan akademis.
 - Diminta kepada Saudara Peneliti agar data dan informasi hanya digunakan sebagai bahan penyusunan Skripsi.
 - Setelah selesai pengambilan/pengumpulan data agar menyampaikan laporan tertulis ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Cq. Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Batas waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bulan, setelah melampaui batas tersebut rekomendasi izin penelitian ini tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sei Rambah
 Pada Tanggal : 11 Mei 2023

a.n. BUPATI SERDANG BEDAGAI
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



RUSMIAN PURBA, SP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690716 199303 2 005

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Serdang Bedagai;
- Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Negara KM. 57 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos. 20995
Email: nakerkop12@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 18.17/100/389/2023

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 645/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 16 April 2023 hal Permohonan melakukan penelitian dan Surat badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai nomor 18.31/070/350/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Surat Izin Penelitian, maka Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah kabupaten Serdang Bedagai dengan ini Menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dea Eka Putri Nasution
NPM : 1903100005
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Benar telah mengadakan penelitian di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 05 s/d 08 Mei 2023 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Perencanaan Top down dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah Pusat Oleh-oleh Serdang Bedagai di Desa Pasar Bengkel".

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



LAMPIRAN 2 Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel

Pedoman Wawancara penelitian ke Dinas Koperasi dan UMKM Serdang Bedagai

Nama : NUSADITA POUWY, S.SOS
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 tahun
Alamat Tinggal : Desa Pindus
Pekerjaan/Jabatan : Kabid Koperasi

A. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down

1. Apa pelatihan digital yang dilakukan oleh pemerintah meningkatkan pemasaran pelaku

UMKM? : Pelatihan digital yang dilakukan pemerintah itu sangat
meningkatkan pelaku ukm. sebab, saat ini digitalisasi itu super cepat
untuk bidang penjualan dan promosi, selain itu tidak memakan
biaya yang mahal

2. Apakah pelatihan digital yang dilakukan oleh pemerintah meningkatkan motivasi pelaku

UMKM dalam meningkatkan pemasaran? : Ya, pelaku ukm sudah melakukan pelatihan
digital, dan rata-rata pemerintah akan mengambil yang dibawah umur 40 tahun
karena mengerti tentang digitalisasi. Pelatihan ini sangat meningkatkan motivasi pelaku
ukm apalagi dengan badan jalan tol jadi sangat membantu dan pemasarannya tidak
hanya se-kabupaten tapi se-indonesia

3. Bagaimana pemerintah dapat mengukur pelatihan digital telah berhasil meningkatkan

pemasaran pelaku UMKM? : Ya, tersebut dan pemerintah mengukurnya 2 minggu
sekaru melihat dan marketplace yang dihasilkan dari target penjualan
jika targetnya tidak terlalu berat terlalu signifikan itu sudah termasuk
kemajuan. pemerintah menggunakan ukm binaan terlebih dahulu baru
yang lain

4. Bagaimanakah perencanaan pemerintah jika sasaran tidak terpenuhi sesuai dengan waktu rencana? Pemerintah tidak dapat mengimintanya sebab kembali dari tingkat Pelatu UKM. Pemerintah hanya dapat membina dan mengetahui hasil penjualan melalui marketplace jika Pelatu ingin maju dapat insialif untuk mengembangkannya sendiri. Pemerintah hanya mengayarkannya

B. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down.

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan UMKM memperhatikan sumber daya pemerintah yang dimiliki? Pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan membantu mengembangkan usaha Pelatu UKM untuk penjualan kerupanya kembali dari Pelatu UKM tersebut

2. Bagaimanakah penerapan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah? Penerapannya dengan pemerintah meninjau kembali UMKM yang diluncurkan. Setelah 2 minggu sudah baru dapat diterapkan. UKM promosi melalui marketplace karena hasil penjualan dan barang yang tidak di stok

3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya tersebut? Yang bertanggung jawab tetap Pelatu UMKM. Pemerintah hanya membantu mengembangkannya dan memberikan inovasi agar dapat terjual dengan modal yang sedikit dari pelatihan

4. Bagaimana pemerintah mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya tersebut? Evaluasinya itu berasal dari pemerintah dan kembarnya ke provinsi dan Kementerian UMKM

C. Adanya perencanaan top down yang sistematis.

1. Apakah ukuran atau tolak ukur bahwa perencanaan pengembangan UMKM Serdang sudah sistematis sesuai dengan perencanaan? : Latar belakangnya masih jor-jor, sebab masih ada yang memiliki modal dan kemampuan juga ada yang memiliki skill tetapi tidak memiliki modal jadi masih terhambat

2. Apakah perencanaan pengembangan UMKM sudah teratur dan sistematis sesuai dengan sasarannya? : sesuai dengan perencanaannya bahwasanya pemerintah memfasilitasi UMKM yang benar-benar potensi pengucukannya banyak

3. Bagaimanakah rangkaian perencanaan pengembangan UMKM hingga mencapai targetnya? : pertama dengan menjaga kualitas barang yang dijual oleh UMKM itu kemudian jika mutu tidak bagus tidak ada pembeli yang tertarik sehingga targetnya tidak akan tercapai pemerintah juga mengajarkan membuat video agar menarik untuk membuat iklan

4. Bagaimanakah sistematis pertanggung jawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai perencanaan pengembangan UMKM? : mengenal pertanggung jawaban setiap pemerintah turun lapangan akan selalu di data dan data tersebut akan ditunjukkan ke instansi yang terkait contohnya dinas provinsi yang utama dari dinas provinsi diteruskan ke kementerian

D. Adanya implementasi perencanaan top down.

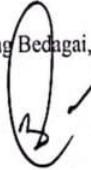
1. Bagaimana bentuk implementasi perencanaan pengembangan UMKM? : bahwa pemerintah membuat pendataan UMKM yang membutuhkan ilmu untuk program digitalisasi. Pemerintah akan mendelegasi sesuai kemampuan pelaku, karena tidak semua mengerti. Sebab pelaku UMKM banyak yg sudah berumur jadi diutamakan yg muda. Tapi walau sudah berumur tapi masih berpeluang jadi diambil alihnya yang dikuatkan pelatihan agar mengerti digitalisasi

2. Siapakah yang bertanggung jawab pada implementasi perencanaan pengembangan UMKM? : Pemerintah, sebab kembali lagi dari tanggung jawab pihak

3. Bagaimana cara pemerintah mengevaluasi implementasi perencanaan pengembangan UMKM? : Pengiri peningkatan para pelaku UMKM akan dibina serta dikembangkan ditinjau dari ada potensinya tidak, jika ada maka akan dibina kemudian dibarengi ilmu dengan pelatihan

4. Bagaimana perkembangan implementasi perencanaan pengembangan UMKM hingga saat ini? : sampai saat ini ada perkembangan UMKM seperti dodol anugrah sebelumnya mau kelap tapi karena binaan dari dulu, pelakunya juga dapat mengikuti pelatihan tersebut maka sejalan karena ada kemauan, sarana dan ilmu jadi dapat dikembangkan

Serdang Bedagai, Mei 2023,


Musa Didiq. Daulay, S. Sos.
198511272003121001

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel

Pedoman Wawancara penelitian ke Pelaku Usaha UMKM Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang
Bedagai Desat Pasar Bengkel

Nama : *Namira Anjani*
 Jenis Kelamin : *perempuan*
 Umur : *18 th*
 Alamat Tinggal : *dk. Murni dsr. 3*
 Pekerjaan/Jabatan : *admin*

A. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down

1. Apa latarbelakang pelaku UMKM perlu melakukan pelatihan digital? :
 menurut kami karena harus melakukan pelatihan digital karena
 sangat berguna bagi usaha kami yang saat ini mengalami
 penurunan.....
2. Apakah sasaran utama dari perencanaan pengembangan UMKM dengan melakukan pelatihan digital dari sisi anda sebagai pelaku UMKM? :
 sasaran utamanya yaitu untuk dapat menarik pelanggan lebih
 banyak.....
3. Bagaimanakah tanggung jawab anda sebagai pelaku UMKM dalam memenuhi sasaran dari pelatihan digital tersebut? :
 tanggung jawab saya sebagai pelaku usaha dalam memenuhi
 sasaran yaitu saya akan terus meningkatkan penjualan dengan
 dunia digital yaitu melalui marketplace seperti yang telah
 dilakukan dalam pelatihan.....

4. Bagaimanakah perencanaan anda sebagai pelaku UMKM jika sasaran tidak terpenuhi sesuai dengan waktu rencana? : Ya mungkin saya akan lebih terdes lagi untuk mempersiapkan product UMKM saya agar sasaran saya bisa dapat tercapai

B. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down.

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan UMKM memperhatikan sumber daya yang anda dimiliki? : Dengan mengikut pelatihan UMKM yang lebih kreatif dan dibantu oleh pemerintah untuk membantu penjualan

2. Bagaimanakah penerapan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh anda? : Penerapan dengan melakukan promosi di marketplace serta selalu mengupdate data penjualan dan barang yang di jual. dapat juga dengan ditambah melakukan ekspor impor agar lebih di seluruh indonesia

3. Bagaimana tanggung jawab anda terhadap pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya tersebut? : selalu menginformasikan inovasi-inovasi dan ide agar penjurumnya menjadi lebih menarik, sehingga para pembeli tertarik pembelian dapat mengutus surat lah seperti digital halai dan lain lain untuk memenuhi daya kate

4. Bagaimana anda mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya tersebut? : Evaluasinya dengan cara penjualan yang didapat serta dari pemerintah yang datang untuk mengau penjualan

C. Adanya perencanaan top down yang sistematis.

1. Apakah ukuran atau tolak ukur bahwa perencanaan pengembangan UMKM Serdang sudah sistematis sesuai dengan perencanaan? :

UMKM serdang tersebut dapat dikatakan sistematis apabila
semua perusahaan UMKM sudah mempunyai rencana

2. Apakah perencanaan pengembangan UMKM sudah teratur dan sistematis sesuai dengan sarannya? : Perencanaan pengembangan UMKM belum berjalan
sesuai keinginan karena sasaran yang kami miliki saat ini
hanya kendaraan yg berhenti saja yang ingin membeli cih-cih

3. Bagaimanakah rangkaian perencanaan pengembangan UMKM hingga mencapai targetnya? :

yang pertama dengan menentukan kualitas produk dan juga
bentuk kemasan jadi dengan kualitas dan pengemasan yang
baik akan mudah untuk menarik perhatian sehingga target
dapat tercapai

4. Bagaimanakah sistematis pertanggung jawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai perencanaan pengembangan UMKM? :

sejauh ini belum pertanggung jawaban dari pemerintah kepada
kami para pelaku UMKM

D. Adanya implementasi perencanaan top down.

1. Bagaimana bentuk implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :

kalau bentuk implementasi yang kami lakukan sejauh ini kami
hanya dalam bentuk media sosial

2. Siapakah yang bertanggung jawab pada implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :

Ya kami sendiri yang bertanggung jawab karena kami yang memiliki usaha

3. Bagaimana cara anda mengevaluasi implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :

Caranya dengan pemburuan setiap bulan berapa omzet yang didapat dari situah maka mengevaluasi sejauh mana upaya yang kami lakukan sudah berjalan

4. Bagaimana perkembangan implementasi perencanaan pengembangan UMKM hingga saat ini?

Perkembangan kalau dari kami sebagai pelaku UEM belum ada peningkatan

Serdang Bedagai, Mei 2023,



Nenira Agani

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel

**Pedoman Wawancara penelitian ke Pelaku Usaha UMKM Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang
Bedagai Desas Pasar Bengkel**

Nama : Ayu Zahara
 Jenis Kelamin : perempuan
 Umur : 10 tahun
 Alamat Tinggal : Lurah Tanah
 Pekerjaan/Jabatan : admin

A. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down

1. Apa latarbelakang pelaku UMKM perlu melakukan pelatihan digital? :

postnya untuk marketing promosi

.....

.....

.....

2. Apakah sasaran utama dari perencanaan pengembangan UMKM dengan melakukan pelatihan digital dari sisi anda sebagai pelaku UMKM? :

Selama ini kami tidak mempunyai akun media sosial untuk usaha kami jadi sasaran kami hanya murni cari motor/mobil yang berhenti

membeli oleh-oleh

.....

3. Bagaimanakah tanggung jawab anda sebagai pelaku UMKM dalam memenuhi sasaran dari pelatihan digital tersebut? : karena kami tidak ada pelatihan online

jadi kami hanya bertanggung jawab terhadap kualitas kami

untuk konsumen

.....

.....

.....

4. Bagaimanakah perencanaan anda sebagai pelaku UMKM jika sasaran tidak terpenuhi sesuai dengan waktu rencana? : Karena kami tidak memiliki modal besar jadi kami tidak memiliki target untuk sasaran. Tapi tidak akan-hari besar untuk target sasaran dan omset minimisasi

B. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down.

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan UMKM memperhatikan sumber daya yang anda dimiliki? : Semampunya kami mempertahankan sumber daya yang ada meskipun memang tidak begitu banyak seperti dulu karena RPE adanya jalan tol dan pasca pandemi

2. Bagaimanakah penerapan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh anda? : Tidak ada yang bisa kami lakukan mengingat memang omset yang kami dapatkan setiap bulan akan terus menurun

3. Bagaimana tanggung jawab anda terhadap pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya tersebut? : Untuk tanggung jawab kami sudah mencoba untuk memberikan pelayanan yang baik dan juga menjaga kualitas pelayanan

4. Bagaimana anda mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya tersebut? : Untuk mengevaluasi biasa kami melakukan setiap satu bulan sekali

C. Adanya perencanaan top down yang sistematis.

1. Apakah ukuran atau tolak ukur bahwa perencanaan pengembangan UMKM Serdang sudah sistematis sesuai dengan perencanaan? : menurut saya pengembangan UMKM di serdang ini belum sesuai perencanaan, dan saya rasa lebih baik ini dengan segitu ada jalan tol membuat banyak ini bagi pengunjung. jadi menurut saya lebih baik perencanaan pengembangan UMKM ini sistematis apabila pihak pemerintah dan Ratu Liman sama-sama ikut serta.
2. Apakah perencanaan pengembangan UMKM sudah teratur dan sistematis sesuai dengan sasarannya? : menurut saya belum
3. Bagaimanakah rangkaian perencanaan pengembangan UMKM hingga mencapai targetnya? : baik dan yang penting dengan memastikan kualitas produk juga keramahan layanan kita bisa menarik pembeli sehingga bisa mencapai target
4. Bagaimanakah sistematis pertanggung jawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai perencanaan pengembangan UMKM? : baik menurut saya belum ada pertanggung jawaban pasti dari pihak pemerintah lokal UMKM ini

D. Adanya implementasi perencanaan top down.

1. Bagaimana bentuk implementasi perencanaan pengembangan UMKM? : tidak ada bentuk implementasi yang cepat dan akurat pada UMKM kami saat ini

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel

Pedoman Wawancara penelitian ke Pelaku Usaha UMKM Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang
Bedagai Desas Pasar Bengkel

Nama : Silvia Vorina
 Jenis Kelamin : perempuan
 Umur : 25 tahun
 Alamat Tinggal : pasar bengkel
 Pekerjaan/Jabatan :

A. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down

1. Apa latarbelakang pelaku UMKM perlu melakukan pelatihan digital? :

ya karena sekarang semua serba digital jadi menurut saya
 pelatihan digital sangat penting

2. Apakah sasaran utama dari perencanaan pengembangan UMKM dengan melakukan pelatihan
 digital dari sisi anda sebagai pelaku UMKM? :

sasaran utama kami tentunya
 untuk meningkatkan penjualan yang semakin banyak

3. Bagaimanakah tanggung jawab anda sebagai pelaku UMKM dalam memenuhi sasaran dari
 pelatihan digital tersebut? :

tanggung jawab saya sebagai pelaku umk
 tentunya berupaya keras untuk memenuhi tujuan utama kami

4. Bagaimanakah perencanaan anda sebagai pelaku UMKM jika sasaran tidak terpenuhi sesuai dengan waktu rencana? : Ya mungkin kami akan lebih meningkatkan promosi digital untuk memenuhi sasaran kami

B. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down.

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan UMKM memperhatikan sumber daya yang anda dimiliki? : sejauh ini karena kami lebih mengikuti pelatihan kami hanya memperhatikan dari sumber daya yang ada seperti pembeli yang langsung datang

2. Bagaimanakah penerapan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh anda? : kalau saya penerapannya yaitu dengan memperhatikan kualitas penjualan &

3. Bagaimana tanggung jawab anda terhadap pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya tersebut? : tanggung jawab saya, saya berusaha untuk membuat ide-ide yang menarik atau menjual produk yang menarik untuk menarik pelanggan

4. Bagaimana anda mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya tersebut? : saya mengevaluasinya dengan pemburuan penjualan setiap bulannya

C. Adanya perencanaan top down yang sistematis.

1. Apakah ukuran atau tolak ukur bahwa perencanaan pengembangan UMKM Serdang sudah sistematis sesuai dengan perencanaan? : menurut saya yang menjadi tolak ukur bahwa umkm ini sudah sesuai perencanaan yaitu dengan adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan usaha kami ini

2. Apakah perencanaan pengembangan UMKM sudah teratur dan sistematis sesuai dengan sasarannya? : menurut saya belum, karena saya sendiri yang sudah berdiri sejak lama dan beberapa tahun terakhir ini dengan dampak jalan tol para umkm ini banyak yang sudah tutup

3. Bagaimanakah rangkaian perencanaan pengembangan UMKM hingga mencapai targetnya? : pastinya dengan cara-cara promosi yang kreatif untuk target akan tercapai

4. Bagaimanakah sistematis pertanggung jawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai perencanaan pengembangan UMKM? : sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah kepada kami para pelaku umkm

D. Adanya implementasi perencanaan top down.

1. Bagaimana bentuk implementasi perencanaan pengembangan UMKM? : bentuk implementasi ya hanya sebatas media sosial atau insiatif saya sendiri

2. Siapakah yang bertanggung jawab pada implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :
saya sendiri karena tidak ada bentuk implementasi dari
pihak pemerintah

3. Bagaimana cara anda mengevaluasi implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :
dengan cara saya menghitung pendapatan omset setiap bulan lalu
saya bisa mengevaluasi sejauh mana upaya yang saya
lakukan untuk usaha saya

4. Bagaimana perkembangan implementasi perencanaan pengembangan UMKM hingga saat ini?
: Perkembangannya ya masih tetap sama tidak ada peningkatan

Serdang Bedagai, Mei 2023,

Sylvia

SYLVIA FARINA

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel

**Pedoman Wawancara penelitian ke Pelaku Usaha UMKM Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang
Bedagai Desas Pasar Bengkel**

Nama : Nisa
 Jenis Kelamin : perempuan
 Umur : 19 tahun
 Alamat Tinggal : Melati II Gg. Jering
 Pekerjaan/Jabatan : Admin

A. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down

1. Apa latarbelakang pelaku UMKM perlu melakukan pelatihan digital? :

Untuk meningkatkan omset kembali

2. Apakah sasaran utama dari perencanaan pengembangan UMKM dengan melakukan pelatihan digital dari sisi anda sebagai pelaku UMKM? : Sasaran kami yaitu meningkatkan penjualan pembeli langsung karena kami memang tidak ada pelatihan digital dan kami juga tidak menggunakan media sosial

3. Bagaimanakah tanggung jawab anda sebagai pelaku UMKM dalam memenuhi sasaran dari pelatihan digital tersebut? : Kami tidak menggunakan digital tetapi untuk mencari secara langsung yang bertanggung jawab kami sendiri selaku pemilik UTM

4. Bagaimanakah perencanaan anda sebagai pelaku UMKM jika sasaran tidak terpenuhi sesuai dengan waktu rencana? kami sih lebih memilih target yang harus dipenuhi sasaran setiap dengan waktu sesuai karena sasaran kami hanya memiliki pembell yang dibayar

B. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down.

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan UMKM memperhatikan sumber daya yang anda dimiliki? karena kami lebih menggunakan media sosial jadi kami murni hanya memanfaatkan sumber daya yang ada dengan waktu pengujian selama 24 jam

2. Bagaimanakah penerapan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh anda? sampai saat ini dengan kondisi pengujian yang menurun karena adanya jalan tol yang kami terapkan yaitu pengujian dengan waktu pengujian di antara lain yang lain hanya kami yang masih menerapkan pengujian selama 24 jam

3. Bagaimana tanggung jawab anda terhadap pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya tersebut? tanggung jawab nya tentu kami akan memberikan pelayanan yang maksimal meskipun di jam jam larut.

4. Bagaimana anda mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya tersebut? caranya dengan pembukuan setiap bulan tentu kami akan mengetahui seberapa omset kami yang naik setiap bulan

C. Adanya perencanaan top down yang sistematis.

1. Apakah ukuran atau tolak ukur bahwa perencanaan pengembangan UMKM Serdang sudah sistematis sesuai dengan perencanaan? : seperti yang kita lihat saat ini

dengan adanya jalan tol pada daerah di pasar bangkai ini menjadi sepi dan upaya pemerintah juga belum ada jadi bisa dibayangkan bahwa pengembangan uem di serdang ini belum tersusun dengan baik

2. Apakah perencanaan pengembangan UMKM sudah teratur dan sistematis sesuai dengan sasarannya? : belum karena belum ada perhatian dari pemerintah

3. Bagaimanakah rangkaian perencanaan pengembangan UMKM hingga mencapai targetnya? :

yang pasti kualitas produk merupakan landasan dalam pengembangan uem, karena kalau kualitas produk saja sudah tidak baik maka tidak akan ada pembeli yang berminat sehingga tidak akan mencapai target yang kita inginkan

4. Bagaimanakah sistematis pertanggung jawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai perencanaan pengembangan UMKM? : belum ada pertanggung jawaban dari pemerintah

D. Adanya implementasi perencanaan top down.

1. Bagaimana bentuk implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :
tidak ada bentuk implementasi yang dapat dituturkan

2. Siapakah yang bertanggung jawab pada implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :

Kami implementasi itu kami yang membuat keitu kami lah sebagai penanggung jawabnya

3. Bagaimana cara anda mengevaluasi implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :

caranya dengan perhitungan pembukuan omzet setiap bulan

4. Bagaimana perkembangan implementasi perencanaan pengembangan UMKM hingga saat ini?

ada ada perkembangan

Serdang Bedagai, Mei 2023,



PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel

**Pedoman Wawancara penelitian ke Pelaku Usaha UMKM Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang
Bedagai Desat Pasar Bengkel**

Nama : Nisa
 Jenis Kelamin : perempuan
 Umur : 19 tahun
 Alamat Tinggal : Melak II Gk sering
 Pekerjaan/Jabatan : admin

A. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down

1. Apa latarbelakang pelaku UMKM perlu melakukan pelatihan digital? :

untuk menaikkan omset kembali

2. Apakah sasaran utama dari perencanaan pengembangan UMKM dengan melakukan pelatihan digital dari sisi anda sebagai pelaku UMKM? : sasaran kami yaitu meningkatkan

pelanggan pembeli langsung karena kami memang tidak ada pelatihan digital dan kami juga tidak menggunakan media sosial

3. Bagaimanakah tanggung jawab anda sebagai pelaku UMKM dalam memenuhi sasaran dari pelatihan digital tersebut? : kami tidak menggunakan alat tetapi untuk

salah satu secara langsung yang bertanggung jawab kami sendiri sebagai pemilik utama

4. Bagaimanakah perencanaan anda sebagai pelaku UMKM jika sasaran tidak terpenuhi sesuai dengan waktu rencana? : kami sih lebih memuat target yang harus memenuhi sasaran setiap dengan waktu setiap. karena sasaran kami hanya menjual Pembeli yang oblong

B. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down.

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan UMKM memperhatikan sumber daya yang anda dimiliki? : karena kami lebih menggunakan media sosial jadi kami mumi hanya memanfaatkan sumber daya yang ada dengan waktu penjualan selama 24 jam

2. Bagaimanakah penerapan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh anda? : sampai saat ini dengan kondisi penjualan yang menurun karena adanya jalan tol, yang kami terapkan yaitu penjualan dengan waktu penjualan diantara lain yang lain hanya kami yang masih menerapkan penjualan selama 24 jam

3. Bagaimana tanggung jawab anda terhadap pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya tersebut? : tanggung jawab nya tentu kami akan memberikan pelayanan yang maksimal meskipun di jam jam larut.

4. Bagaimana anda mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan UMKM yang memperhatikan sumber daya tersebut? : caranya dengan pembelian setiap bulan tentu kami akan mengetahui seberapa omset kami yang naik setiap bulan

C. Adanya perencanaan top down yang sistematis.

1. Apakah ukuran atau tolak ukur bahwa perencanaan pengembangan UMKM Serdang sudah sistematis sesuai dengan perencanaan? : seperti yang kita lihat saat ini dengan adanya jalan tol pada daerah di pasar banatei ini menjadi smp dan upaya pemerintah juga belum ada jadi bisa dibayangkan bahwa pengembangannya di serdang ini belum terstruktur dengan baik

2. Apakah perencanaan pengembangan UMKM sudah teratur dan sistematis sesuai dengan sasarannya? : belum karena belum ada perhatian dari pemerintah

3. Bagaimanakah rangkaian perencanaan pengembangan UMKM hingga mencapai targetnya? : yang pasti kualitas produk merupakan rangkaian dalam pengembangan UMKM karena kalau kualitas produk saja sudah tidak baik maka tidak akan ada pembeli yang berminat sehingga tidak akan mencapai target yang kita inginkan

4. Bagaimanakah sistematis pertanggung jawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai perencanaan pengembangan UMKM? : belum ada pertanggung jawaban pasti dari pemerintah

D. Adanya implementasi perencanaan top down.

1. Bagaimana bentuk implementasi perencanaan pengembangan UMKM? : tidak ada bentuk implementasi yang dapat diuraikan

2. Siapakah yang bertanggung jawab pada implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :

Kalisi implementasi itu kami yang membuat lalu kami lah sebagai penanggung jawabnya

3. Bagaimana cara anda mengevaluasi implementasi perencanaan pengembangan UMKM? :

caranya dengan perhitungan pembukuan omset setiap bulan

4. Bagaimana perkembangan implementasi perencanaan pengembangan UMKM hingga saat ini?

hidup ada perkembangan

Serdang Bedagai, Mei 2023,



LAMPIRAN 3 Dokumentasi Penelitian









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/DK/BAN-PT/Head P/10/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Muhtar Sani No. 2 Medan 20238 Telp. (061) 8021000 - 80214507 Fax. (0618) 8025474 - 8031023
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: info@umsu.ac.id Facebook: [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id) Instagram: [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id) Twitter: [umsu.ac.id](https://twitter.com/umsu.ac.id)

SK-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan,20.....

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DEA EKA BUTE AJST
 N P M : 1903100000
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 133... sks, IP Kumulatif 3,57...

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Strategi perencanaan partisipatif dalam pengembangan UINOP (misal: UKM dan menengah (UMKM) rural dan-urban yang sedang berkembang di desa perior Bangor	<i>Acc 15/12 2022</i>
2	Strategi perencanaan partisipatif dalam keterkaitan peran kepala dan warga mitra dalam pengembangan UINOP di perior Bangor	
3	Strategi perencanaan terhadap pengajaran UINOP di perior Bangor	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP setiap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Haturrahan.

Rekomendasi Ketua Program Studi;
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20.....

Ketua,

(Rahma Mawardi N. S. Set. M. SP)
 NIDN: 012110001

PB: DED AMRIZAL

Pembohon

(DEA EKA BUTE AJST)

Dosen Pembimbing yang diajukan

(Dede Amrizal)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/DAN-PT/DAL/K/P/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Makmur Besar No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622430 - 6622457 Fax. (061) 6625474 - 6637083
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: info@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 37/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 23 Desember 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing peralisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : DEA EKA PUTRI NST
 N P M : 1903100005
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERENCANAAN TOP DOWN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PUSAT OLEH-OLEH SERDANG BEDAGAI DI DESA PASAR BENGKEL**

Pembimbing : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 009.19.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Desember 2023.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 14 Dzulhijjah 1444 H
 07 Januari 2023 M



Zambunan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringat.


 DEDI AMRIZAL, S.Sos., MSP.
 NIDN: 0030017402





UIN Muhammadiyah Sumatera Utara
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 8224587 - (061) 8224588 Ext. 200-201 Fax. (061) 8225478
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : akir@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. _____ Medan, 20....
 Bapak/Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wa, w.b.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DEDI EKA PUTRI ASTI
 N.P.M : 1903100005
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 77 /SK/II.3/UMSU-03/F2013 tanggal 7 JANUARI 2013 dengan judul sebagai berikut :

STUDI KASUS PERENCANAAN BUDAYA BERKEMBANGAN PADA MASA BAKI DAN MENERJAH (UMMAH) PUSAT DAH-DAH-KHAS SIKINDANG BERKAWAL DI JASA JASUR SIKINDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s.d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menghantar:

Pembimbing

(Dedi Eka Putri Asti, S.Si, M.Si)

Pemohon,

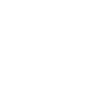
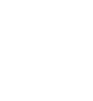
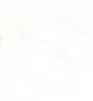
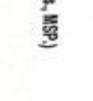
(DEDI EKA PUTRI ASTI)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 367/JUND/1.3/AYUN/SU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Pembicara : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENEMBITING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	CINDY AJIJA	190310007	IDA MARTINELLI S.H., M.H. S.Sos., M.SP.	ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP.	STRATEGI DIRECTING LURAH DALAM MENGELOPOR-TILKAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN SOREHO HILIR
7	PANJUDANS SUHARJI	190310005	PALESTI NULAR RIZKY S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGERTIHAN ALUR HILIR DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN
8	PRAETIYA SARI ANA PUTRI	190310038	DECI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI, S.H., M.H. S.Sos., M.SP.	FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL LAPISAN LEBERGA ANAK ZAKAT INFAN DAN SAKITAN MUHAMMADIYAH DALAM PENYALURAN BEKASNYA MENYARI DI KOTA MEDAN
9	FEBRIYANTI ALIDA LUBIS	190310007	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFTAN AL-QUDUS, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PENGANAKSAN LANSUNG KEPALA DESA DALAM PROGRAM DASWISMA DI DESA HUTABERIKIN TOMBANG CUSTAK (TB)
10	DEA EKA PUTRI NEST	190310005	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	DECI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENGEMBANGAN USWAK MUDA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PUSAT OLEH-OLEH KHAS SERDANG BEDAGA DI DESA PISAR BENGKEL





LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Dea Eka Putri Nst

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “**EFEKTIVITAS PERENCANAAN TOP DOWN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PUSAT OLEH-OLEH SERDANG BEDAGAI DESA PASAR BENGKEL**” has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 3 No 1 June (2023). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, May 20, 2023

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891



UMSU
 UINdangPangSilaN UlaN SkRipsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGPANGSILAN ULAN SKRIPSI
 Nomor : 782/JUNDIH.3.AJU/UMSU-QSR/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJILIH			Judul Skripsi
			PENJILIH I	PENJILIH II	PENJILIH III	
1	HARI RAMADHAN	1903100074	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. JEHAN RICHQ ZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP	FUNGSI ACTUATING DALAM PENGELOMAN PERSAMPARAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
2	QURETIA AYUHI	1903100031	Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP	RAFEAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	Dr. JEHAN RICHQ ZHARSYAH, S.Sos., M.Si	OPTIMALISASI MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR LURAH PASAR MERAH TIMUR
3	DEAFIKA PUTRINISI	1903100005	Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP	RAFEAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TOP DOWN DALAM PENGEMBANGAN USHAH MIKRO KECIL DAN MENENGAH RUSAH OLEH-OLEH SERDANG PEDAGAN DI DESA PASAR BENGKEL
4	ERMA VANIA	1903100016	M.Si	Dr. JEHAN RICHQ ZHARSYAH, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	PERAN PENGAWASAN LANGSUNG LURAH DALAM MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN KARTINI
5	MUTIA ANGGRIANI	1903100047	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	RAFEAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUNJUMAN TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETAH KOTA MEDAN

Nonulis Sidang:

Medan, 04 Dzulhaidjah 1444 H
 24 Mei 2023 M

Disiapkan oleh:

 Prof. Dr. Harjuno Arifin, SH, M.Hum

Ketua

 Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP



Sekretaris

 Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

